KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Wacana Tunda Pemilu Masih Bikin Deg-degan
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pentolan DPR & Parpol Terbelah

Wacana Tunda Pemilu Masih Bikin Deg-Degan

Wacana penundaan Pemilu membikin kalangan pimpinan partai politik dan DPR terbelah.

PUAN Maharani sebagai pimpinan tertinggi di lembaga legislatif, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, menolak wacana itu. Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar akan terus mendorong wacana tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Barisan Kader (Barikade) Gusdur, Sudarsono Rahman mengapresiasi sikap Puan yang menolak wacana penundaan pemilu itu.

"Gus Dur itu sangat menghormati konsitusi. Tak seenaknya mengubah jadwal Pemilu hanya karena kepentingan pragmatis politik," ujar Sudarsono kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Pria yang akrab disapa Gus Dar ini menyayangkan sikap elit parpol yang bersuara menunda Pemilu 2024. Muhaimin Iskandar yang menyatakan tetap berupaya melobi ketum partai untuk melanjutkan ini.

Menurutnya, sikap Ketum PKB itu bertentangan dengan perjuangan Gus Dur, selaku pendiri partai dan dikenal sebagai pejuang demokrasi. "Nah, politisi yang mengusulkan menunda Pemilu berarti menginjak-injak demokrasi. Mencla-mencle. Semua diterabas untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya," ujarnya, geregetan.

Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan sikapnya mendukung Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal. Pernyataan itu, disampaikan saat berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (15/3). "Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," ungkapnya.

Sementara Muhaimin Iskandar seolah belum lempar handuk atas wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengaku masih mencoba melobi partai politik lain ihwal gagasannya ini. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mengaku tidak berubah pikiran sekalipun Presiden Joko Widodo menyatakan akan taat konstitusi. Menurutnya, usulan penundaan pemilu itu masih sejalan dengan UUD 1945.

Bagi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, wacana penundaan pemilu itu masih mengkhawatirkan. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa saja menjadi alat pemerintah untuk menunda gelaran Pemilu 2024.

"Saya hanya ingin berbagi kekhawatiran, sehingga terjadi keadaan krisis konstitusional dan seakan terjadi keadaan objektif rasional untuk menunda pemilu," kata Zainal di jejaring *YouTube* miliknya, Senin (14/3).

Sontak, Zainal menganalisa dua skenario yang akan terjadi. Pertama, Anggota KPU medio 2022-2027 yang akan dilantik nanti menyatakan tidak mampu menggelar pesta demokrasi.